

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEBAS SAMPAH (ZERO WASTE) DAN PENGELOLAANNYA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

IMPLEMENTATION OF ZERO WASTE-FREE PROGRAM POLICY AND ITS MANAGEMENT BY THE ENVIRONMENTAL AND FORESTRY DEPARTMENT OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE



Disusun oleh:

NURUL AINI

216110113

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2020

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEBAS SAMPAH (ZERO WASTE) DAN PENGELOLAANNYA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

IMPLEMENTATION OF ZERO WASTE-FREE PROGRAM POLICY AND ITS MANAGEMENT BY THE ENVIRONMENTAL AND FORESTRY DEPARTMENT OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE



Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh:
NURUL AINI
216110113

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEBAS SAMPAH (*ZERO WASTE*) DAN PENGELOLAANNYA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Disusun dan diajukan oleh :

NURUL AINI

NIM. 216110113

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi
pada hari : Sabtu, 08 Januari 2020

Pembimbing I

Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S.

NIDN. 0031126484

Pembimbing II

M. Ufatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP

NIDN. 0809039203

Mengetahui,

Prodi Administrasi Publik

Ketua

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP

NIDN.0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEBAS SAMPAH (*ZERO WASTE*) DAN
PENGELOLAANNYA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”

Oleh :

NURUL AINI
NIM. 216110113

Pada tanggal, 07 Februari 2020

Telah disetujui dengan baik di depan dosen penguji :

1. Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S.
NIDN. 0031126484

(ketua)



2. M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP
NIDN. 0809039203

(Anggota)



3. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

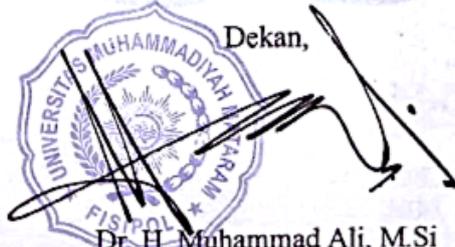
(Anggota)



Mengesahkan,

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURUL AINI

NIM : 216110113

Judul Skripsi : “Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) Dan Pengelolaannya Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah *ditulis* atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 21 Januari 2020

Penulis,



Nurul Aini

NIM. 216110113



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HURUL ANI
NIM : 216110113
Tempat/Tgl Lahir : Serangai, 21 Mei 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085328328336 / hurulaini210509@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (Zero Waste) dan Pengelolannya Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Provinsi NTB

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Kamis, 12 Maret 2020

Penulis

NIM. 216110113

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Nurul Aini, lahir pada tanggal 21 Mei 1999, anak bungsu dari tiga bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda Alm. Ridaah dan Hj. Baiq Saudah, penulis pertama kali menepuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar Negeri 04 Kesik Tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sikur dan selesai pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sikur pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016. Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2020.

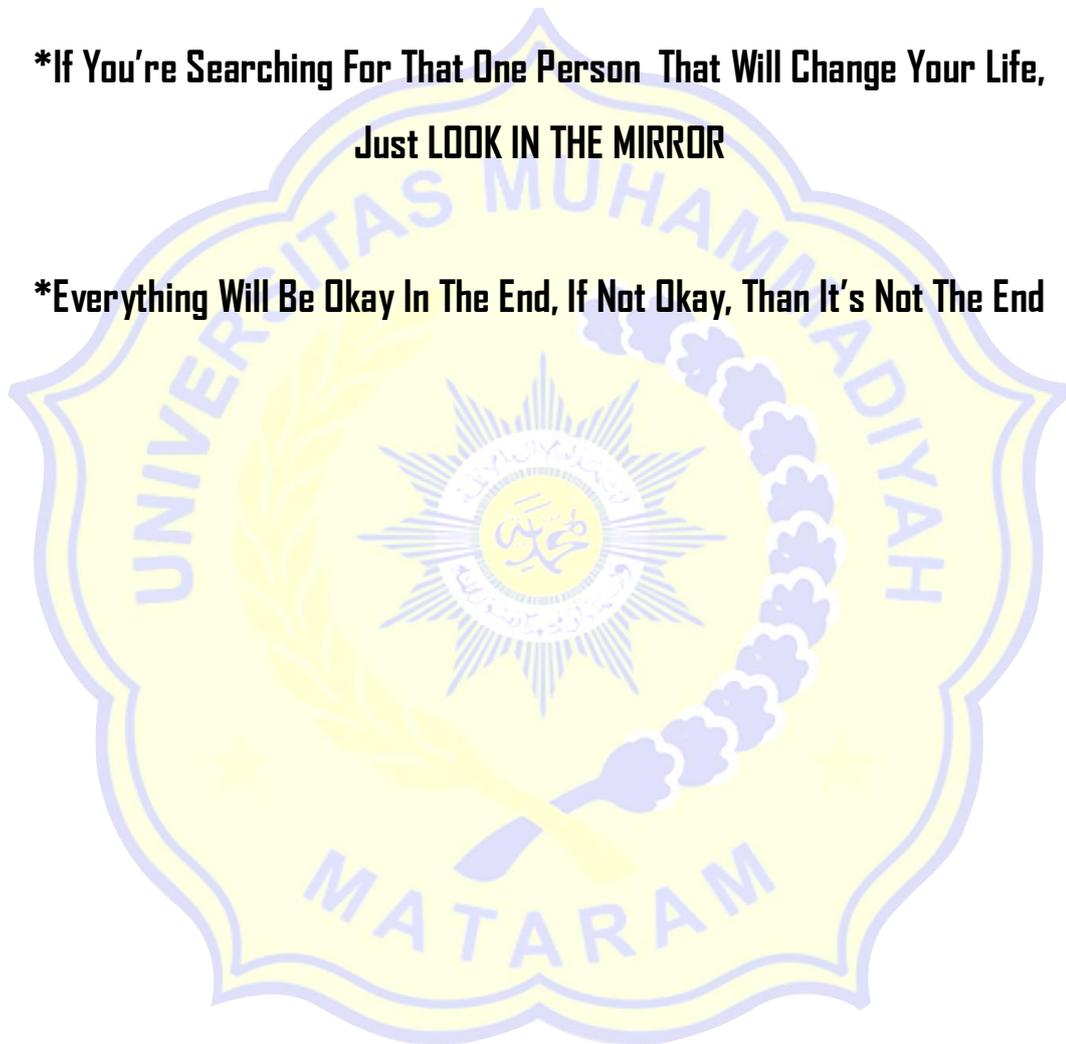
Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan dukungan dari kedua orangtua, keluarga dan sahabat dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) Dan Pengelolaannya Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

MOTTO

***BERPIKIR LUAS DAN MULAI BERTINDAK**

***If You're Searching For That One Person That Will Change Your Life,
Just LOOK IN THE MIRROR**

***Everything Will Be Okay In The End, If Not Okay, Than It's Not The End**



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S Al-Insyirah: 7-9)

Sujud syukur ku persembahkan pada Mu Ya Allah, tuhan yang maha agung dan maha tinggi, atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, dan bersabar menjalani kehidupan ini waktu yang sudah jalani dengan jalan hidup yang menjadi takdirku. Sedih, bahagia bertemu dengan orang-orang yang memberikan sejuta pengalaman dan warna warni kehidupan di dunia ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Ibuku tercinta Hj. Baiq Saudah, ayahku tercinta Alm. Ridaah dan ayahku tercinta H. Lalu Nuradi Akbar. Sosok orang yang selalu memberiku dorongan dan motivasi tanpa ada akhir, kasih sayang yang tak terhingga.
Ayah ibu terimalah bukti kecil ini sebagai hadiah yang terindah sebagai tanda bukti keseriusan saya dalam hidup ini.
2. Terima kasih untuk sosok laki-laki yang teristimewa dalam hidup saya atas doa, dukungan, semangat serta bantuan sehingga saya bisa menyelesaikan karya ini dengan baik.
3. Terimakasih untuk kakak-kakak ku tercinta M. Tanwin, Dan Eva Rini Rahayuni yang memberikan dukungan serta semangat kepada saya.
4. Terima kasih sahabat yang sangat teristimewa Ayu Wulandari Wiranata Dan Mirzha Febrianti.
5. Untuk teman-teman saya yang selalu membantu dan mendukung : Winda, Nuro, Firnandi, Sarwan dan Kak Eri Sulastri.
6. Terimakasih untuk Universitas Muhammadiyah Mataram

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada saya terutama berupa kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (Zero Waste) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat**”, dan tak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Secara pribadi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat serta bantuan dalam penyelesaian Proposal ini, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. selaku Kepala program studi administrasi Publik
4. Bapak Dr. H. Mustamin H. Idris, M.S selaku dosen pembimbing I skripsi.
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar S.AP., M.IP selaku dosen pembimbing II skripsi.
6. Bapak dan ibu yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan dan motivasi serta nasehat.

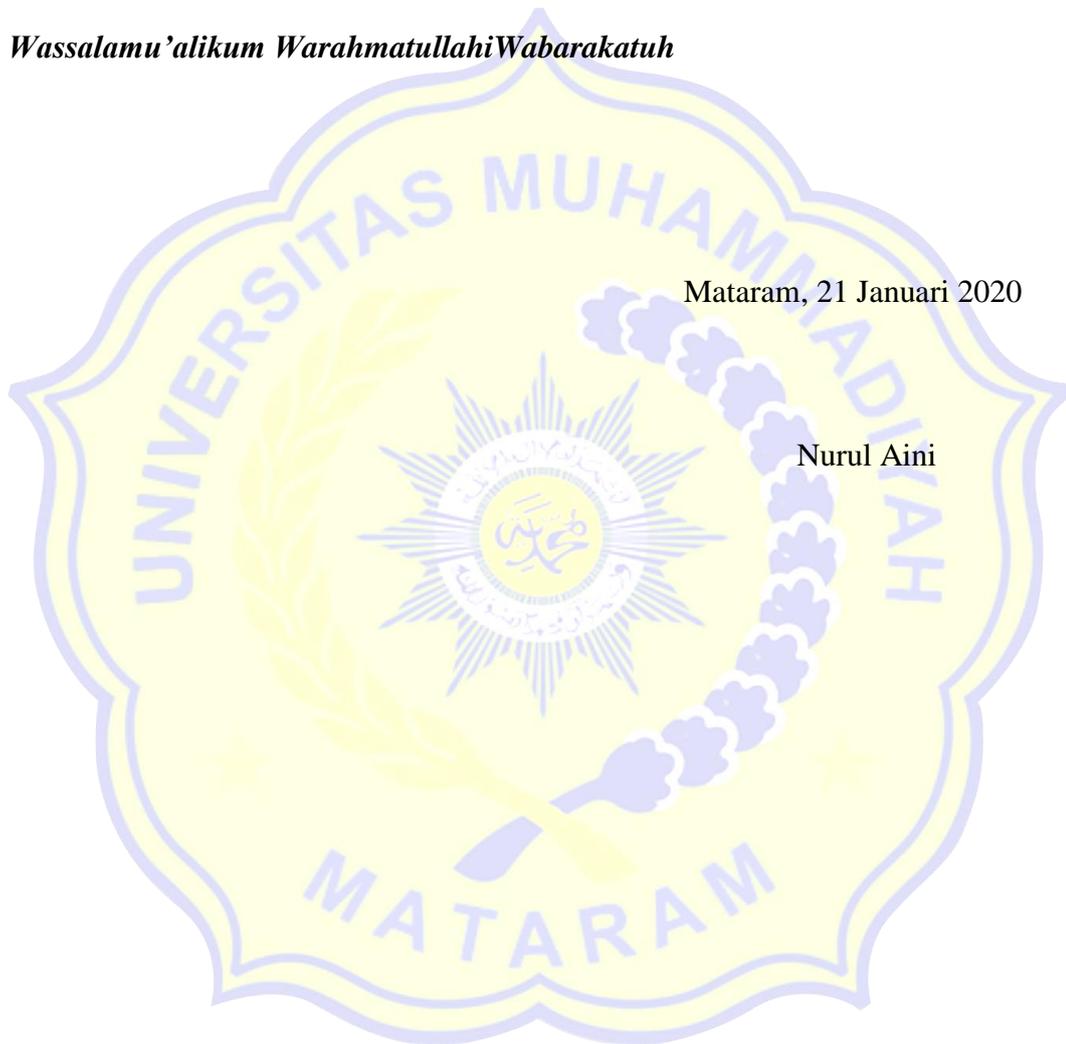
7. Sahabatku tercinta Ayu Wulandari Wiranata dan Mirzha Febrianti yang selalu memberikan semangat, dorongan dan bantuan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyesunan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan..

Wassalamu'alikum WarahmatullahiWabarakatuh

Mataram, 21 Januari 2020

Nurul Aini



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Tentang Kebijakan	10
1. Teori Kebijakan.....	10
2. Implementasi Kebijakan.....	13
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	17
B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tentang Sampah	22
1. Pengertian Sampah.....	22
2. Jenis-Jenis Sampah.....	24
3. Sumber Sampah.....	25
C. Bebas Sampah (<i>Zero Waste</i>)	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Penentuan Informan.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data	32
1. Data Primer.....	32
2. Data Sekunder	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Teknik Observasi.....	33
2. Teknik Wawancara.....	34
3. Teknik Dokumentasi	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
1. Reduksi Data	36
2. Penyajian Data.....	36
3. Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DLHK Provinsi NTB.....	38
1. Sejarah Umum DLHK Provinsi NTB	38
2. Tugas Dan Fungsi DLHK Provinsi NTB	38
3. Visi Dan Misi DLHK Provinsi NTB	39
4. Struktur Dan Bidang Kerja DLHK Provinsi NTB	41
B. Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (<i>Zero Waste</i>)	52
1. Komunikasi	52
2. Sumber Daya	60
3. Disposisi	71
4. Struktur Birokrasi	74
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Impementasi Kebijakan <i>Zero Waste</i>	78
1. Faktor Pendukung Impementasi Kebijakan <i>Zero Waste</i>	78
2. Faktor Penghambat Impementasi Kebijakan <i>Zero Waste</i>	80

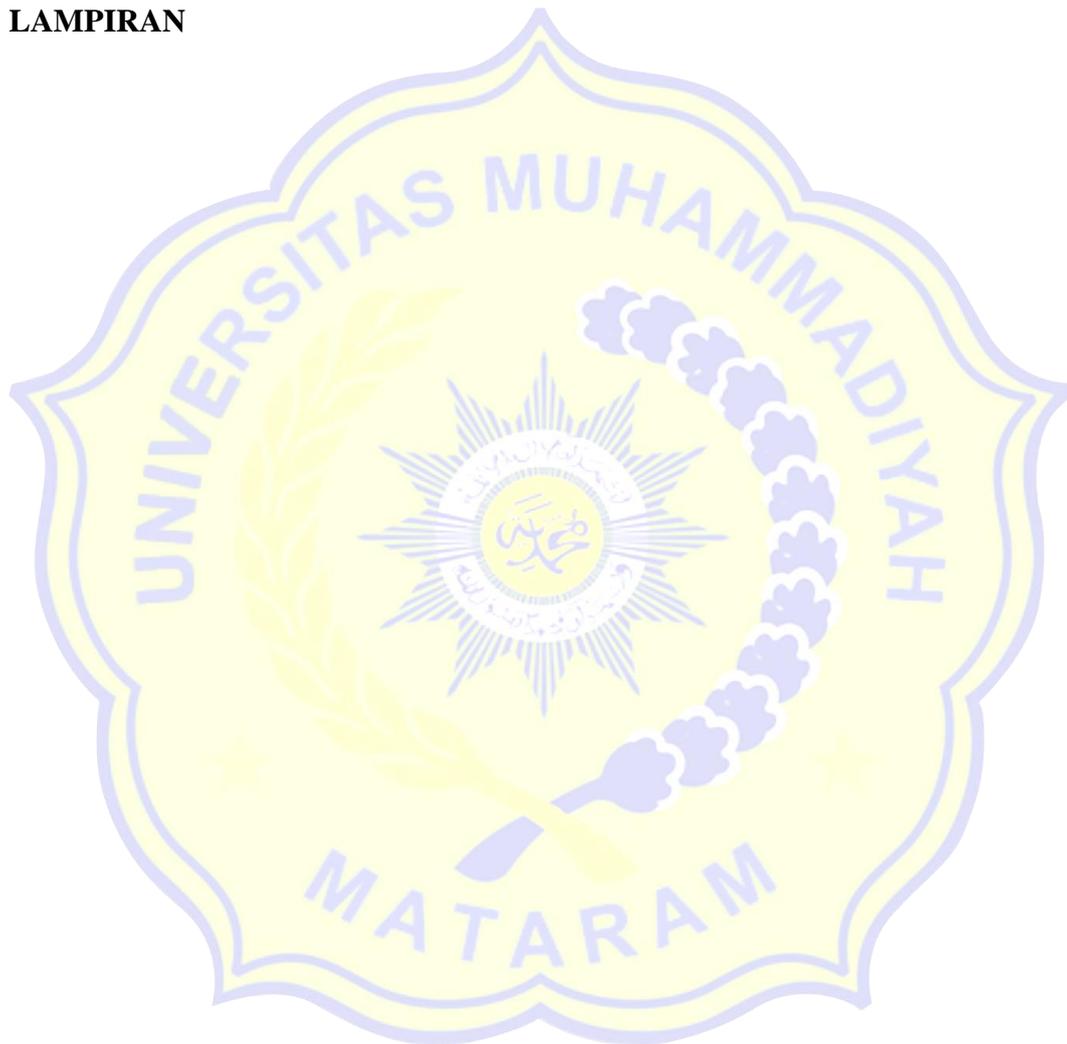
D. Upaya Yang Dilakukan DLHK Provinsi NTB untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Program Bebas Sampah	80
---	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84

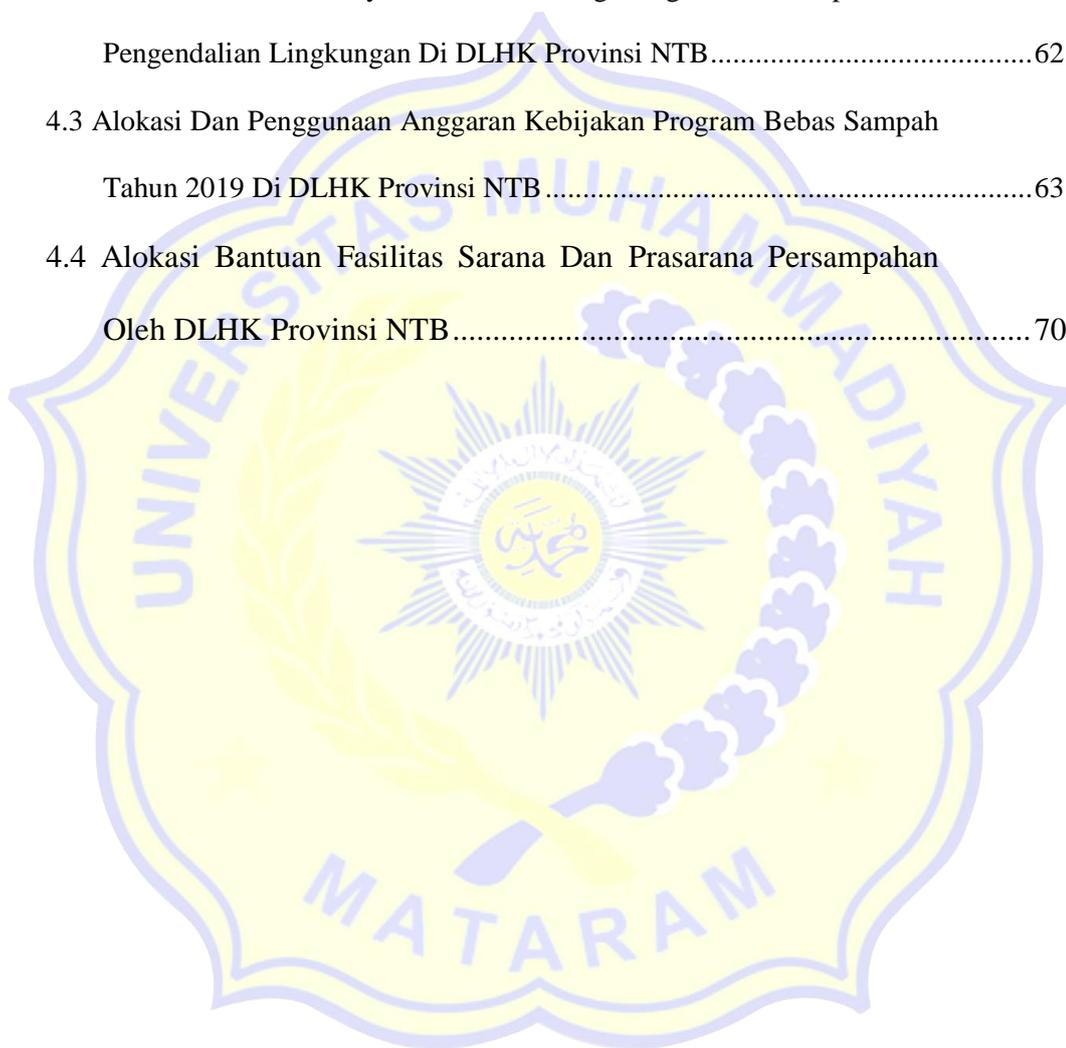
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Jumlah Sampah Do Provinsi Ntb	4
4.1 Data Kuantitas Rapat DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat Terkait Sampah	54
4.2 Distribusi Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Sampah Dan Pengendalian Lingkungan Di DLHK Provinsi NTB.....	62
4.3 Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Kebijakan Program Bebas Sampah Tahun 2019 Di DLHK Provinsi NTB	63
4.4 Alokasi Bantuan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Persampahan Oleh DLHK Provinsi NTB.....	70



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEBAS SAMPAH (ZERO WASTE) DAN PENGELOLAANNYA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**Nurul Aini¹, Drs. Mustamin H Idris, M.S²,
M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP³**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program bebas sampah (*zero waste*) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program bebas sampah (*zero waste*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yang mana penulis hanya menggambarkan masalah sebagaimana adanya atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program bebas sampah (*zero waste*) umumnya sudah berfungsi dan direalisasi. Implementasi kebijakan program bebas sampah (*zero waste*) yang didasarkan pada empat indikator yang mempengaruhi berdasarkan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah berjalan cukup efektif. Meskipun sudah berjalan cukup efektif perlu di optimalkan lagi terutama dalam pengadaan fasilitas dan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi.

Faktor pendukung dalam implemementasi kebijakan program *zero waste* ini yaitu adanya dukungan pemerintah terhadap program, sumber daya finansial yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat dalam implemementasi kebijakan program *zero waste* ini yaitu kurangnya fasilitas terutama pada armada pengangkutan, rendahnya kesadaran masyarakat dimana dalam prakteknya cenderung kurang memperhatikan tentang masalah penimbunan sampah terutama penggunaan pada bahan atau produk sekali pakai. Untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan bebas sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mengambil langkah yaitu peningkatan sosialisasi dan pengadaan fasilitas.

Kata kunci : Implemementasi Kebijakan, Program Bebas Sampah (zero waste)

**IMPLEMENTATION OF ZERO WASTE-FREE PROGRAM POLICY AND
ITS MANAGEMENT BY THE ENVIRONMENTAL AND FORESTRY
DEPARTMENT OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE**

*Nurul Aini¹, Drs. Mustamin H Idris, M.S²,
M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP³*

*Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram*

ABSTRACT

This research was carried out at the West Nusa Tenggara Province Environment and Forestry Office. The purpose of this study was to determine the implementation of zero waste program policies and to determine the supporting and inhibiting factors for implementing the program policies. This study uses descriptive-qualitative data analysis techniques.

The results of this study indicate that the implementation of the zero waste program policy has generally been functioning and realized. The implementation of a zero waste program policy which is based on four influential indicators based on Edward III's theory, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure has been running quite effectively but needs to be optimized again especially in the provision of facilities and public awareness through socialization.

Supporting factors for the implementation of this program are the government's support for the program, adequate financial support, and the availability of human resources. The inhibiting factors are lack of facilities and low public awareness. To overcome the obstacles in implementing waste free policies, the NTB Provincial Office of the Environment and Forestry is taking steps to increase the socialization and procurement of facilities.

Keywords: implementation of policies, zero waste program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang bersih untuk menunjang kesehatan. Lingkungan yang bersih tentu tercipta dari kesadaran pada diri manusia akan lingkungan sekitarnya. Pada umumnya yang menjadi permasalahan utama kebersihan lingkungan adalah sampah, lingkungan yang bersih akan sangat terlihat ketika terbebas dari sampah.

Kebersihan lingkungan juga tidak hanya tercipta dari kemampuan manusia dalam menjaga kebersihannya tetapi juga bagaimana manusia mampu mengelola sampah sehingga tidak mencemari lingkungan hidup itu sendiri. Indonesia yang masih statusnya sebagai negara berkembang tentu sistem pengelolaan sampahnya berbeda dengan negara maju. Di banyak kota di negara berkembang sistem pengelolaan sampah oleh pemerintah maupun swasta ternyata tidak mampu mengatasi jumlah timbunan sampah yang kian hari kian bertambah. Akibatnya volume sampah terus menerus meningkat. Sampah dari berbagai sumber yang terus diproduksi setiap harinya tidak mampu dikelola dan ditampung, akibatnya terjadi kerusakan lingkungan, mulai dari limbah yang mencemari sungai, sampah plastik yang di timbun mengakibatkan rusaknya kesuburan tanah seperti yang diketahui sampah plastik sendiri membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai oleh bakteri.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang jutaan jiwa tentu sampah yang dihasilkan lebih banyak. Dari keseluruhan sampah tersebut hanya sekitar 40 persen dari timbunan sampah yang terangkut, sisanya hanya dibakar, ditimbun, bahkan dibuang ke sungai, tentu hal itu mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan. Padahal apabila sampah dapat dikelola dengan baik dan benar akan mampu memberikan manfaat yang besar, salah satunya dapat menciptakan nilai ekonomi jika sampah itu sendiri bisa dijadikan kerajinan tangan.

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi maupun dalam kebersihan lingkungan hidup. Dalam UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Pasal 3 tentang pengelolaan sampah dikatakan bahwa pengelolaan sampah diseenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Sampah sendiri merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan produk yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan, dan ingin dibuang oleh manusia dengan kata lain sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Pola pengelolaan sampah saat ini masih menganut paradigma lama di mana sampah dianggap sebagai sesuatu yang tak berguna, tidak bernilai ekonomis, dan hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Hingga saat ini, di Indonesia sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sampah menjadi

suatu problema yang sangat pelik dalam suatu daerah perkotaan hingga pedesaan ketika sampah tidak teroganisir dengan baik. Penanganan sampah dari tingkat desa hingga pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat volumenya yang kian hari kian membengkak atau bertambah sementara kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat minim.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), permasalahan sampah menjadi permasalahan *urgent* dan memang membutuhkan penanganan extra dari pemerintah. Saat ini masyarakat membutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi sampah secara menyeluruh. Selain penanganan diharapkan pemerintah juga dapat menciptakan suatu terobosan yang mampu mengantisipasi peningkatan volume sampah yang terus meledak. Upaya untuk mengatasi masalah sampah ini sebenarnya memang sudah cukup lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebanyak 2.695 ton atau 80 persen dari total sampah di Nusa Tenggara Barat tidak terurus dengan baik. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Syamsudin menyatakan volume sampah di 10 Kabupaten/Kota di NTB mencapai 3.388 Ton dan sampah yang dibuang perhari mencapai 6 Ton. Sedangkan yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah 641,92 ton dan sudah di daur ulang hanya 51,21 ton perhari. (<https://m.republika.co.id>)

TABEL 1.1
JUMLAH SAMPAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Kab/Kota	Sampah (Ton/Hari)	Ke TPA (Ton/Hari)	Daur Ulang (Ton/Hari)	Tidak Terkelola	
					Ton/Hari	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Mataram	314,30	283,00	15,71	15,59	5%
2	Lombok Barat	469,56	60,00	0,56	409,00	87%
3	Lombok Utara	149,15	21,00	0,00	128,15	86%
4	Lombok Tengah	645,73	12,25	5,81	627,67	97%
5	Lombok Timur	801,74	15,40	0,08	786,26	98%
6	Sumbawa Barat	92,39	28,70	3,25	60,44	65%
7	Sumbawa	311,85	115,97	6,24	189,64	61%
8	Dompu	164,27	39,60	0,00	124,67	76%
9	Bima	325,94	20,00	19,56	286,38	88%
10	Kota Bima	113,83	46,00	0,00	67,83	60%
	TOTAL	3.388,76	641,92	51,21	2.695,63	80%

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Volume sampah yang terus meningkat sedangkan ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang masih terbatas mengakibatkan lahan TPA memiliki umur yang pendek karena tidak mampu lagi menampung

sampah yang ada. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama di pinggir jalan akibat tidak ada lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bisa digunakan untuk menampung sampah yang ada. Pengelolaan sampah yang hanya memperhatikan Tempat Pemrosesan akhir (TPA) sampah tanpa melalui proses di sumbernya. Hal inilah yang membuat beban TPA menjadi berat dan umur penggunaan TPA itu menjadi singkat. Tentu disini Pemerintah selaku *stakeholder* mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan meningkatkan berbagai fasilitas untuk pengelolaan sampah seperti tong sampah, pengadaan Bank Sampah, truk pengangkut hingga Tempat Pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi ini tentunya harus segera diantisipasi karena fasilitas yang memadai tentunya dapat mendorong percepatan terhadap antisipasi dan penanganan sampah.

Perilaku manusia yang tergolong konsumtif juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatkan volume sampah terutama penggunaan barang sekali pakai. Kesadaran masyarakat yang masih minim akan penumpukan sampah terutaman sampah anorganik menjadi kendala dalam mengantisipasi permasalahan sampah, padahal seperti yang kita ketahui sampah anorganik membutuhkan waktu puluhan tahun agar bisa terurai sehingga dengan adanya hal tersebut kondisi lingkunganpun menjadi tidak baik.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya menangani permasalahan sampah menyebabkan terhambatnya percepatan penanganan terhadap kondisi sampah yang semakin pelik. Padahal permasalahan sampah ini sangat mendesak untuk segera di tangani. Bukan hanya kebijakan dari pemerintah tapi kesadaran

dan kemauan untuk berpartisipasi dalam menangani akan sangat memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat juga harusnya dapat melihat kondisi yang makin hari sampah makin menumpuk dan tentunya menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan.

Kurangnya *skill* masyarakat untuk mengelola sampah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi maupun agar bisa digunakan kembali masih sangat kurang. Sebenarnya sampah tidak hanya menjadi barang buangan ketika seseorang mampu mengelolanya dengan baik, tidak hanya bisa digunakan kembali tapi juga dapat bernilai ekonomi. Ketika masyarakat memiliki skill dalam mengelola sampah, bukan hanya sekedar masalah penumpukan sampah yang bisa di atasi tapi itu bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian. Disinilah peran pemerintah perlu ditingkatkan, dimana pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Tidak hanya pelatihan, komunikasi antara pemerintah selaku implementor dengan masyarakat sebagai komunikan juga perlu di tingkatkan untuk menciptakan ke sinkronan pelaksanaan kebijakan. Seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, Spanduk sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah.

Selain itu masyarakat juga membutuhkan wadah untuk menyalurkan kemampuan yang dalam hal ini untuk mengelola sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali ataupun menjadi barang yang bernilai ekonomi. Akan sangat sulit suatu penuntusan masalah ketika masyarakat telah memiliki keinginan

tapi tidak punya wadah untuk menyalurkannya. Wadah inilah yang bisa dikatakan sebagai faktor terpenting dan wadah bisa melalui pengadaan dan penguatan fungsi Bank Sampah.

Dengan adanya permasalahan sampah yang semakin pelik, tentunya pemerintah dituntut menyediakan solusi untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Saat ini banyak program yang disodorkan pemerintah untuk mengatasi masalah persampahan di berbagai penjuru. Salah satunya adalah program Bebas Sampah (*Zero waste*). Konsep Bebas Sampah (*Zero waste*) artinya memperlakukan sampah kedalam kondisi nol atau tak bersisa. Dengan penerapan konsep Bebas Sampah (*Zero waste*), maka lingkungan akan benar-benar terhindar dari penumpukkan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik sehingga kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akan dapat dihindarkan.

Untuk merealisasikan program zero waste tentu implementor kebijakan dituntut untuk berkerja extra dalam proses implementasinya mulai dari peningkatan komunikasi dengan sosialisai kepada masyarakat akan pentingnya mengatasi permasalahan sampah, perbaikan fasilitas dan berbagai hal yang memang dibutuhkan dalam merealisasikan program bebas sampah ini.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan “Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (*Zero Waste*) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam kajian tentang kebijakan program Bebas Sampah (*Zero Waste*) dan sumber bagi peneliti-peneliti yang tertarik terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola program Bebas Sampah (*Zero Waste*). Setelah itu juga di harapkan mampu menambah khazanah kepustakaan ilmu administrasi publik khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam mengelola program Bebas Sampah (*Zero Waste*)

2) Manfaat Praktis

Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasi program Bebas Sampah (*Zero Waste*), dan masukan untuk pemerintah sebagai bahan merumuskan kebijakan dalam pengelolaan sampah.

3) Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) pada Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Tentang Kebijakan

1. Teori Kebijakan

Kebijakan publik secara sederhana dapat dipandang sebagai konsep dasar rencana pemerintah untuk mengatur kepentingan publik atau masyarakat. Sedangkan secara umum kebijakan publik merupakan segala bentuk tindakan pemerintah untuk kepentingan umum. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang(UU), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan publik juga bisa berbentuk program yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat.

Menurut Young dan Quinn, (dalam Edi Suharto, 2010 :44-45) Mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luar maupun sempit. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, akan lebih baik kita membahas beberapa konsep kunci kebijakan publik :

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

- 2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- 5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum di rumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakn publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut William N.Dunn (dalam Sinaga, 2017) bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut

tugas pemerintah, seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah baik berupa tindakan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Kebijakan tentunya ditujukan untuk mengatasi masalah di kelompok masyarakat yang timbul melalui isu kebijakan.

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipantau tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Implementasi kebijakan publik juga merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik dikarenakan suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Adapun makna implementasi menurut Wahab (2014 : 133) menyatakan bahwa:

“Impelementasi dalam arti seluas-seluasnya yaitu bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggraan aktiivitas yang telah di tetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), actor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknbik secara sineggitis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.”

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. Berikut ini akan dibahas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan impelementasi kebijakan pengelolaan sampah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Purwadi (2017) tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah belum terlaksana secara maksimal karena forum masyarakat yang ada masih sebatas lingkup RW, yakni LKM-RW. Faktor penghambat dalam implementasi pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah adalah kurangnya

sosialisasi Perda tersebut oleh Dinas terkait yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, sehingga sosialisasi kepada masyarakat jadi terhambat, walaupun ada kegiatan perencanaan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Sampah sebelumnya, namun perwujudannya belum ada hingga sekarang. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, jenis penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Harsya (2017) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang limbah masih belum berjalan optimal karena masih ada beberapa kendala. Faktor - faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Padang Utara adalah Pelaksana Kebijakan Kinerja Pekerja Sampah yang masih rendah, fasilitas dan infrastruktur masih kurang dan partisipasi publik masih rendah. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan).

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum maksimal dilakukan. Karena kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sangat minim dan masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan yang telah dibuat pemerintah dalam hal yang membuang sampah diluar jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan sehingga mengakibatkan masih terlihat tumpukan sampah yang terdapat di sisi jalan yang ada di Kecamatan Tampan selain itu sarana dan prasarana yang masih kurang dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penghabat dalam impelementasinya. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Naditya (2015) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di RW 3 Kelurahan Sukun sudah cukup efektif, hal ini bisa dilihat dari pengelolaan sampah di BSM yang sudah sangat terorganisir. Adapun faktor pendukung dari keberhasilan implementasi ini adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam

menangani sampah, Sumber daya yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitasnya. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

Kelima, Penelitian yang dilakukan Said, dkk (2015) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam hal komunikasi yang dijalankan internal Dinas Kebersihan bagi pelaksanaan program belum berjalan optimal. Ketersediaan sumber daya memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya ataupun tidaknya suatu kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Komitmen dari para pelaksana program terlihat memiliki rasa kekeluasaan yang besar untuk mewujudkan dan mensukseskan program. Serta pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan belum memiliki kejelasan standart yakni dengan penentuan standar opsional prosedur dalam mejalankan program. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Model implementasi Edward III dalam Leo Agustino (2014, 149-154) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi

Dalam impementasi kebijakan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Impementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasipun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlakukan agar para pembuat keputusan dan para impelementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :

- a. Transmisi ; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu impelementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah

melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan ; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi impementasi, pada tataran tertentu, para peaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan meyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi ; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang di berikan sering berubah-ubah maka akan dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

- a. Staf, Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan impelementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran tentu akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan bebas sampah ini karena program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal ketika anggarannya tidak memadai.
- c. Wewenang, Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu :

- a. Pengangkatan birokrat ; Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi kepentingan warga.

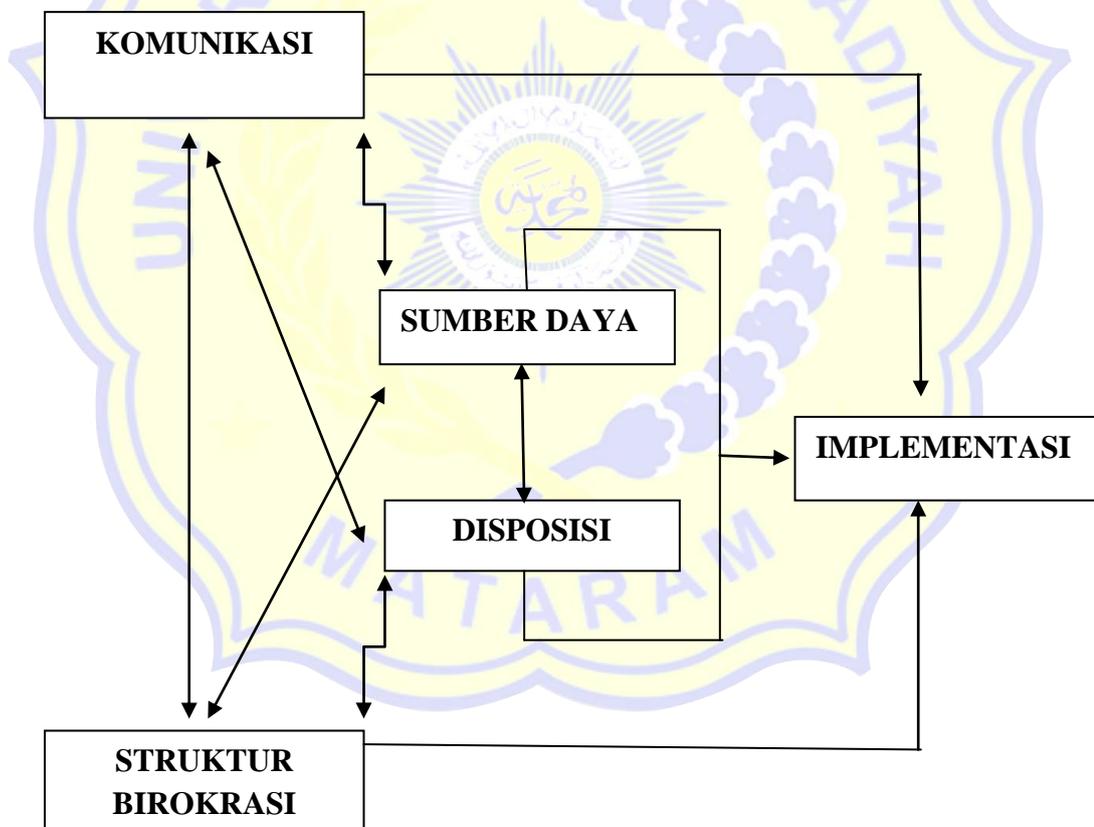
- b. Insentif : salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melakukan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di beberapa unit kerja.



B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan produk yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan, dan ingin dibuang oleh manusia dengan kata lain sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Pengertian lainnya dari sampah yaitu adalah sesuatu yang dibuang dan sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang sudah terjadi, baik itu yang berasal dari kegiatan industri maupun dari kegiatan rumah tangga.

Sisa material tersebut bisa berupa sesuatu yang dihasilkan dari hewan, manusia, ataupun tumbuhan yang sudah tidak digunakan lagi. Biasanya sisa material tersebut akan dilepaskan ke alam dan sudah berbentuk cair, padat ataupun gas. Sampah memiliki beberapa jenisnya, yang harus diketahui agar sampah tersebut tidak mencemari lingkungan. Di tiap kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah, baik di rumah tangga, industri, dan aktivitas lain. Sampah terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Tiap jenis sampah memiliki cara pengolahan yang berbeda-beda.

1. Definisi Sampah Secara Umum

Pengertian sampah secara umum adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

2. Arti Sampah Menurut KBBI

Pengertian sampah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi seperti kotoran, daun, kertas dan lain-lain.

3. Pengertian Sampah Menurut Para Ahli

Berikut merupakan beberapa pengertian dan definisi sampah menurut teori dan pendapat para ahli lingkungan dan sejenisnya.

a. Menurut Juli Soemirat (1994)

Definisi sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.

b. Prof. W. Radyastuti (1996)

Mengemukakan pendapat bahwa pengertian sampah secara singkat adalah sumber daya yang tidak siap pakai.

4. Menurut WHO

Pengertian sampah menurut WHO (World Health Organization) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

5. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

2. Jenis-Jenis Sampah

Sampah bukan hanya sesuatu yang harus kita buang di tempatnya, tetapi juga sesuatu yang wajib kita ketahui mengenai jenis-jenisnya. Dengan begitu maka kita akan paham jenis sampah mana yang bisa dimanfaatkan kembali, dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Jenis-jenis sampah tersebut diklasifikasikan di dalam beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis Sampah Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya jenis sampah ini dibagi kembali menjadi 2 macam, diantaranya yaitu :

- a) Sampah organik yaitu suatu jenis sampah yang dapat membusuk, dan terurai kembali. Sampah ini dapat dijadikan pupuk kompos yang berguna dalam menyuburkan tanaman. Contohnya sisa makanan dari sayur-sayuran, daun kering atau makanan.
- b) Sampah anorganik yaitu sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali. Diketahui sampah anorganik juga bisa terurai setelah puluhan tahun lamanya. Namun keunggulannya yaitu dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas dan masih banyak lagi.

2. Jenis Sampah Berdasarkan Bentuknya

Menurut bentuknya jenis sampah dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya yaitu :

- a) Sampah padat yaitu sampah yang merupakan jenis material, yang dibuang oleh manusia (kotoran manusia tidak termasuk). Jenis sampah

yang termasuk pada sampah padat diantaranya yaitu plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan sebagainya.

- b) Sampah cair yaitu jenis sampah yang berbahan cair yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan dibuang ke tempat sampah. Contohnya sampah cair yang berasal dari toilet, sampah cair yang berasal dari dapur, dan sampah cair yang berasal dari tempat cucian.

3. Sumber Sampah

Ada beberapa sumber sampah yang umum dan yang paling sering terjadi, diantaranya yaitu :

- a) Sampah Dari Rumah Tangga

Jenis sampah yang berasal dari segala jenis kegiatan di rumah tangga biasanya berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah dari kebun dan halaman, dan masih banyak lagi.

- b) Sampah Dari Pertanian

Jenis sampah yang berasal dari kegiatan pertanian merupakan jenis sampah organik. seperti misalnya jerami dan sejenisnya. Namun sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen, biasanya akan dibakar dan dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Untuk sampah jenis bahan kimia seperti pestisida, memerlukan perlakuan khusus.

Karena sampah tersebut mengandung racun, diperlukan perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Jenis sampah pertanian lainnya yaitu beberapa lembaran plastik penutup tumbuhan, yang

berfungsi dalam mengurangi penguapan dan untuk menghambat pertumbuhan gulma, dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.

c) Sampah Yang Berasal Dari Daerah Perdagangan Atau Perkantoran

Jenis sampah yang berasal dari daerah perdagangan contohnya adalah toko, pasar tradisional, warung dan pasar swalayan yang berupa kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik lainnya yang berasal dari sampah makanan restoran. Sedangkan sampah yang berasal dari lembaga pendidikan diantaranya yaitu kertas, bolpoin, alat tulis, dan lain-lain. Masih ada lagi contoh lainnya yaitu toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, klise film, komputer yang sudah rusak dan lain-lain. Baterai bekas dan bahan kimia lainnya harus dikumpulkan terpisah dan mendapat perlakuan khusus, karena merupakan bahan yang berbahaya.

d) Sampah Yang Berasal Dari Industri

Jenis sampah yang satu ini merupakan sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi, yang berupa bahan-bahan kimia, serpihan atau potongan-potongan bahan. Lalu yang berasal dari perlakuan dan pengemasan suatu produk yang berupa kertas, kayu, kain, lap, yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. Sampah industri biasanya memang berupa bahan-bahan kimia yang mengandung bahan beracun, yang memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang agar tidak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya.

C. Bebas Sampah (*Zero Waste*)

Konsep Bebas Sampah (*Zero waste*) artinya memperlakukan sampah kedalam kondisi nol atau tak bersisa. Dengan penerapan konsep Bebas Sampah (*Zero waste*), maka lingkungan akan benar-benar terhindar dari penumpukkan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik dan tentunya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akan dapat terhindarkan.

Bebas sampah (*Zero Waste*) merupakan suatu program yang mendorong penggunaan kembali suatu produk dan menekankan pencegahan pada penggunaan produk sekali pakai. Sehingga sampah dapat dikurangi dan diharapkan sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dapat dikurangi hingga di tiadakan.

Pengelolaan secara *zero waste* merupakan pengelolaan dengan melakukan pemilahan antara barang yang bisa digunakan kembali dan barang layak jual hingga diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Pemilahan sampah dalam rumah tangga harus didukung fasilitas pewardahan berupa tong sampah yang memadai. Tong sampah yang harus disediakan dalam rumah minimal 2 jenis sampah yaitu sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering). Sampah yang telah terpilah menjadi sampah basah dan kering selanjutnya dilakukan pengelolaan yaitu pengomposan dan memilah sampah layak jual. Pengomposan merupakan teknik untuk mengolah sampah organik yang berupa sampah organik yaitu sampah dari sisa makanan, sisa potongan sayur dan buah atau sampah dapur dan lain sebagainya. Jika sampah organik rumah tangga dikelola secara mandiri yakni dengan cara dikomposkan maka

sampah anorganik harus dikelola dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dapat mendukung pengelolaan sampah anorganik rumah tangga adalah para pelaku usaha daur ulang informal antara lain pemulung, tukang loak, pengrajin produk daur ulang dan lain sebagainya. Saat ini, khusus untuk sampah plastik kemasan berlapis aluminium foil serta ada alternatif baru yaitu menabung sampah di bank sampah.

Widiarti (2012), menyatakan *Zero waste* pada dasarnya bukanlah pengelolaan hingga tidak ada lagi sampah yang dihasilkan karena tidak ada aktivitas manusia yang tidak menghasilkan sampah. Namun, konsep ini menekankan pada upaya pengurangan hingga nol jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Konsep Program *zero waste* pada umumnya adalah pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan, metode tersebut adalah 3R (*Reduce, Rause, and Recycle*) Yaitu:

- a. Mengurangi sampah (*Reduce*), artinya tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. Menekan volume sampah yang kian hari kian meningkat tentu bukan hal yang mudah. Metode *Reduce* menekankan pada pengurangan penggunaan produk sekali pakai seperti tissue, air gelas kemasan dan lain sebagainya.
- b. Menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan (*Rause*), artinya menekan pada penggunaan produk hingga tidak bersisa.

- c. Mendaur ulang (*Recycle*), artinya barang yang kemungkinan masih bisa digunakan di daur ulang hingga digunakan kembali ataupun bisa bernilai ekonomi.

Dengan konsep pengelolaan 3R ini diharapkan mampu menekan jumlah sampah dan mampu mengubah *mindset* masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sehingga lingkungan akan benar-benar terhindar dari penumpukkan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik dan tentunya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akan dapat dihindarkan.

Bebas Sampah mengacu pada pengelolaan sampah yang menekankan pencegahan. Bebas Sampah mencakup lebih dari menghilangkan sampah melalui daur ulang dan penggunaan kembali, tetapi bebas sampah juga menekankan pada bagaimana memanfaatkan sampah yang sudah ada. Bebas Sampah menyediakan banyak upaya penghilangan sampah secara terus menerus hingga permasalahan sampah ini dapat diatasi secara total. Jadi sampah yang ada kita cegah dan sampah yang sudah ada kita kelola.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan program *zero waste* dalam pengelolaan sampah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mempelajari implementasi kebijakan program *zero waste* dalam pengelolaan sampah. Kenapa peneliti mengambil pendekatan deskriptif karena pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan terhadap masalah yang diteliti atau yang terjadi di lapangan, sifat atau kondisi yang sesuai dengan kenyataan dengan memaparkan data tertulis dan bukan dengan angka-angka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini diadakan. Daerah penelitian sangat penting untuk memperoleh data dalam hal penyusunan karya ilmiah. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jln. Majapahit No. 54, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu pada bulan oktober 2019 s/d bulan pebruari 2020 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Penentuan Informan

Ada dua karakter objek penelitian dan penguasaan informasi peneliti tentang objek penelitian, yaitu pertama peneliti sebelumnya sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian dan kedua peneliti benar-benar buta informasi tentang objek penelitian. Kedua karakter inilah yang membedakan cara memperoleh informan penelitian (Burhan Bungin, 2007 : 78)

Dalam penelitian ini menggunakan istilah informan sebagai subjek dalam penelitian kualitatif dimana Informan yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono(2018 : 218-219) *Purposive Sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informan yang digunakan dari subjek penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Pengendalian Pencemaran, Kepala Seksi Pengelolaan sampah, Duta zero waste dari Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Konservasi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh seorang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010:157).

Sumber data primer dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Pengendalian Pencemaran, Kepala Seksi Pengelolaan sampah, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Konservasi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengerti tentang sampah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Sumber data yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar yang terkait dengan materi serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pencatatan, dokumen dan data

yang ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB maupun informasi yang berhubungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Sugiyono (2018: 145-146) membagi beberapa macam observasi, observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang terang atau tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstruktur observation*). Observasi partisipatif, adalah observasi yang melibatkan peneliti dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sementara observasi terang terang atau tersamar, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terang terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Sedangkan observasi yang tidak berstruktur ialah observasi yang dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

Berdasarkan teori di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi yang berstruktur. Terkait dengan

Implementasi Kebijakan Program *Zero Waste* dan penegelolaannya, sesuai dengan metode yang pertama adalah metode observasi, peneliti merasa sangat tepat menggunakan metode ini.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Menurut Moleong, (2014: 186) Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Karna wawancara terstruktur peneliti akan menyusun terlebih dulu pertanyaan yang akan diajukan pada informan untuk menguatkan informasi yang ingin peneliti dapatkan dan wawancara tak terstruktur juga akan membantu peneliti menggali informasi lebih dalam kepada informan, peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan seiring berjalanya wawancara nantinya. Saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu *record video* untuk membantu penyusunan skripsi. Konsep wawancara akan peneiliti lampirkan dihalaman lampiran.

3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan arsip-arsip, buku-buku, catatan secara tertulis, pengalaman dan rangkaian peristiwa yang dianggap penting dan berguna. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian

untuk menjadikan informasi tambahan agar melengkapi data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka dilakukan suatu analisis data dengan maksud untuk mengolah data yang ada. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ada dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansi dengan menggunakan metode tertentu (Moleong, 2010:247).

Sedangkan menurut Bogdan dalam Sugiyono (2018:244) menyatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dengan proses analisis data dalam penelitian kualitatif dan peneliti menggunakan teknik deskriptif, maka dalam Sugiyono (2018:247) ada tiga komponen dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data. Untuk mereduksi data, peneliti membuat ringkasan kontak, mengembangkan kategori, pengkodean dan membuat catatan refleksi yang bermaksud menajamkan, menggolongkan, mengarahkan yang tidak berlaku. Kemudian mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang tepat, ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.
- b. Penyajian data adalah merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah upaya yang diperoleh selama pengumpulan data berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Berdasarkan pendapat diatas, maka peneliti diharapkan dapat menemukan temuan yang baru yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penarikan kesimpulan adalah dengan memberikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan kesimpulan ini akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Terakhir, apabila pengumpulan data atau kesimpulan yang kurang jelas, maka kesimpulan final peneliti ialah terus mengadakan pengujian (verifikasi) selama penelitian berlangsung dengan berbagai cara antara lain meninjau ulang catatan di lapangan.

